



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA YANG BERLAKU PADA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Standar Biaya Masukan Lainnya yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya Masukan Lainnya yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2016, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Masukan Lainnya adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan untuk acuan pelaksanaan anggaran Tahun 2016.
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
3. Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan di muka Persidangan.
4. Beracara sebagai Kuasa Hukum Instansi di Persidangan adalah tugas yang dilaksanakan oleh pegawai BPKP sebagai kuasa hukum BPKP dalam pelaksanaan tuntutan hak oleh/kepada BPKP baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh/kepada pihak yang berkepentingan yang dilaksanakan di muka pengadilan.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (2) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diatur tersendiri oleh satuan kerja di lingkungan BPKP dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja masing-masing.
- (2) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melampaui batas tertinggi yang diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

- (1) Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan yang dapat diberikan honorarium adalah pemberian keterangan ahli yang dilaksanakan oleh pegawai BPKP pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Pelaksanaan beracara di muka Persidangan yang dapat diberikan honorarium, meliputi agenda: mediasi/pemeriksaan persiapan, pemeriksaan dan penyerahan alat bukti surat, pemeriksaan keterangan saksi, pemeriksaan keterangan Ahli, dan/atau pemeriksaan setempat.

Pasal 5

- (1) Biaya transportasi pergi pulang dibayarkan berdasarkan realisasi (*at cost*) sesuai dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Biaya transportasi pergi pulang dari Jakarta ke Bogor/Bandung/sekitarnya dan sebaliknya dibayarkan paling besar sesuai tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Biaya transportasi dalam kota dibayarkan sesuai tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dalam kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya transportasi dalam kota, dapat diberikan biaya secara *at cost*.
- (5) Biaya transportasi dalam kota tidak dapat dibayarkan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam satu kompleks perkantoran yang sama.
- (6) Biaya transportasi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun dan sebaliknya yang tidak diatur di dalam Peraturan Kepala Badan ini dibayarkan sesuai tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku.
- (7) Biaya transportasi yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya dibayarkan berdasarkan realisasi, paling besar sesuai tarif pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini dan dituangkan dalam Daftar Pengeluaran Riil.
- (8) Biaya transportasi perjalanan dinas tidak dapat dibayarkan apabila perjalanan menggunakan kendaraan dinas.

- (9) Dalam hal kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak disediakan bahan bakar minyak, biaya transportasi perjalanan dinas ke luar kota dapat dibayarkan berdasarkan realisasi, paling besar sesuai tarif pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (10) Dalam hal tidak tersedia moda transportasi reguler, dapat dibayarkan sewa moda transportasi.
- (11) Sewa moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) untuk wilayah:
 - a. Ambon menuju Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - b. Bandara terdekat Merauke menuju Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel;
 - c. Bandara terdekat Nabire menuju Enarotali, Kabupaten Paniai.sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

- (1) Ketentuan biaya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.
- (2) Ketentuan biaya transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2016.

Pasal 7

Biaya transportasi yang telah direalisasikan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya yang Berlaku pada BPKP Tahun Anggaran 2015.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2016

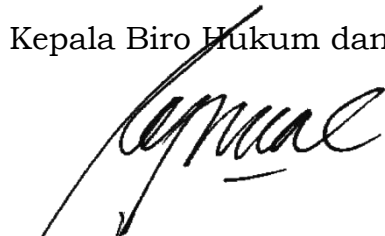
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.
ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1322

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAIFUDIN TAGAMAL

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA
YANG BERLAKU PADA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2016

STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA YANG BERLAKU PADA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2016
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

No.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Honorarium Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan			
1)	Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000	Orang/Kali
2)	Beracara sebagai Kuasa Hukum Instansi di Persidangan	OK	1.800.000	Orang/Kali
3)	Ahli/Pakar/Praktisi	OJ	1.700.000	Maksimal 3 Jam/sidang
2.	Honorarium Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	250.000	Maksimal 2 mata ajar/pegawai, diberikan kepada pegawai: – Bukan tugas pokok, atau

No.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
				- Tugas pokok, kelebihan jam kerja
3.	Honorarium Pemeriksaan Hasil Ujian	Peserta/ Mata Ujian	10.000	Maksimal 50 peserta/pemeriksa soal
4.	Honorarium Instruktur/Asisten <i>Workshop</i>			
1)	Instruktur (satu orang)	OJ	125.000	Maksimal 6 jam <i>workshop</i>
2)	Instruktur (dua orang)	OJ	87.500	Maksimal 6 jam <i>workshop</i>
3)	Asisten (satu orang)	OJ	62.500	Maksimal 6 jam <i>workshop</i>

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAIFUDIN TAGAMAL

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA
YANG BERLAKU PADA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2016

STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA YANG BERLAKU PADA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2016
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
I.	Satuan Biaya Uang Transpor		
1.	Provinsi Aceh		
1)	Banda Aceh	Banda Aceh	150.000
2)	Banda Aceh	Jantho, Kab. Aceh Besar	70.000
3)	Banda Aceh	Sigli, Kab. Pidie	80.000
4)	Banda Aceh	Meureudu, Kab. Pidie Jaya	110.000
5)	Banda Aceh	Bireuen, Kab. Bireuen	140.000
6)	Banda Aceh	Redelong, Kab. Bener Meriah	250.000
7)	Banda Aceh	Takengon, Kab. Aceh Tengah	270.000
8)	Banda Aceh	Blangkejeren, Kab. Gayo Lues	370.000
9)	Banda Aceh	Kutacane, Kab. Aceh Tenggara (Via Medan)	460.000
10)	Banda Aceh	Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe	180.000
11)	Banda Aceh	Lhoksukon, Kab. Aceh Utara	200.000

No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
12)	Banda Aceh	Idi, Kab. Aceh Timur	240.000
13)	Banda Aceh	Langsa, Kota Langsa	270.000
14)	Banda Aceh	Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang	300.000
15)	Banda Aceh	Calang, Kab. Aceh Jaya	160.000
16)	Banda Aceh	Meulaboh, Kab. Aceh Barat	230.000
17)	Banda Aceh	Jeuram, Kab. Nagan Raya	250.000
18)	Banda Aceh	Balang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya	280.000
19)	Banda Aceh	Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan	325.000
20)	Banda Aceh	Subulussalam, Kota Subulussalam	400.000
21)	Banda Aceh	Singkil, Kab. Aceh Singkil	420.000
22)	Banda Aceh	Sabang, Kota Sabang (Kapal)	180.000
23)	Banda Aceh	Kutacane, Kab. Aceh Tenggara (Via Medan, udara dan darat)	1.560.000
24)	Banda Aceh	Sinabang, Kab. Simeuleu (Via Medan, Udara)	3.554.000
25)	Banda Aceh	Sinabang, Kab. Simeuleu (Via Medan, Darat dan Udara)	2.754.000
2.	Provinsi Sumatera Utara		
1)	Medan	Medan	150.000
2)	Medan	Binjai, Kota Binjai	60.000
3)	Medan	Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang	72.000
4)	Medan	Stabat, Kab. Langkat	72.000
5)	Medan	Kabanjahe/Brastagi, Kab. Karo	100.000
6)	Medan	Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai	100.000
7)	Medan	Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	100.000
8)	Medan	Pematang Siantar, Kota Pematang Siantar	150.000
9)	Medan	Indrapura/Lima Puluh, Kab. Batubara	150.000
10)	Medan	Kisaran, Kab. Asahan	240.000
11)	Medan	Sidikalang, Kab. Dairi	240.000
12)	Medan	Pematang Raya, Kab. Simalungun	240.000
13)	Medan	Tanjung Balai, Kota Tanjung Balai	270.000
14)	Medan	Salak, Kab. Pakpak Bharat	300.000
15)	Medan	Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan	300.000

No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
16)	Medan	Aek Kanopan, Kab. Labuhan Batu Utara	300.000
17)	Medan	Rantau Prapat, Kab. Labuhan Batu	287.000
18)	Medan	Panguruan, Kab. Samosir	330.000
19)	Medan	Balige, Kab. Toba Samosir	300.000
20)	Medan	Tarutung, Kab. Tapanuli Utara	330.000
21)	Medan	Padang Sidempuan, Kab. Tapanuli Selatan	328.000
22)	Medan	Sibolga, Kota Sibolga	345.000
23)	Medan	Pandan, Kab. Tapanuli Tengah	345.000
24)	Medan	Kota Pinang, Kab. Labuhan Batu Selatan	360.000
25)	Medan	Penyabungan, Kab. Mandailing Natal	420.000
26)	Medan	Gunung Tua, Kab. Padang Lawas Utara	420.000
27)	Medan	Sibuhuan, Kab. Padang Lawas	420.000
28)	Medan	Sibolga, Kota Sibolga (Udara)	950.000
29)	Medan	Kota Gunung Sitoli, Kab. Nias (Udara)	1.300.000
30)	Bandara Binaka (Kab. Nias)	Kota Gunung Sitoli, Kab. Nias	120.000
31)	Bandara Binaka (Kab. Nias)	Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan	300.000
32)	Bandara Binaka (Kab. Nias)	Lotu, Kab. Nias Utara	300.000
33)	Bandara Binaka (Kab. Nias)	Lahomi, Kab. Nias Barat	300.000
34)	Bandara Pinangsore (Kab.Tapteng)	Pandan, Kab. Tapanuli Tengah	120.000
35)	Bandara Pinangsore (Kab.Tapteng)	Sibolga, Kota Sibolga	120.000
3.	Provinsi Sumatera Barat		
1)	Padang	Padang	150.000
2)	Padang	Parit Malintang, Kab. Pariaman	110.000
3)	Padang	Pariaman, Kota Pariaman	110.000
4)	Padang	Padang Panjang, Kota Padang Panjang	120.000
5)	Padang	Arosuka, Kab. Solok	120.000
6)	Padang	Solok, Kota Solok	120.000
7)	Padang	Painan, Kab. Pesisir Selatan	120.000
8)	Padang	Bukit Tinggi, Kota Bukit Tinggi	130.000

No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
9)	Padang	Sawahlunto, Kota Sawahlunto	130.000
10)	Padang	Payakumbuh, Kota Payakumbuh	150.000
11)	Padang	Sarilamak, Kab. Lima Puluh Kota	150.000
12)	Padang	Batusangkar, Kab. Tanah Datar	140.000
13)	Padang	Lubuk Basung, Kab. Agam	150.000
14)	Padang	Muaro Sijunjung, Kab. Sijunjung	150.000
15)	Padang	Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman	200.000
16)	Padang	Simpang Empat, Kab. Pasaman Barat	200.000
17)	Padang	Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya	200.000
18)	Padang	Padang Aro, Kab. Solok Selatan	200.000
19)	Bandara Rokot (Kep. Mentawai)	Tuapejat, Kab. Kepulauan Mentawai	300.000
4.	Provinsi Sumatera Selatan		
1)	Palembang	Palembang	150.000
2)	Palembang	Pangkalan Balai, Kab. Banyuasin	120.000
3)	Palembang	Sekayu, Kab. Musi Banyuasin	190.000
4)	Palembang	Inderalaya, Kab. Ogan Ilir	110.000
5)	Palembang	Prabumulih, Kota Prabumulih	140.000
6)	Palembang	Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir	140.000
7)	Palembang	Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu	200.000
8)	Palembang	Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	250.000
9)	Palembang	Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur	220.000
10)	Palembang	Muara Beliti, Kab. Musi Rawas	320.000
11)	Palembang	Lubuk Linggau, Kota Lubuk Linggau	290.000
12)	Palembang	Muara Enim, Kab. Muara Enim	220.000
13)	Palembang	Lahat, Kab. Lahat	240.000
14)	Palembang	Pagar Alam, Kota Pagar Alam	280.000
15)	Palembang	Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang	300.000

No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
16)	Palembang	Talang Ubi, Kab. Pali	220.000
17)	Palembang	Muara Rupit, Kab. Musi Rawas Utara	325.000
18)	Palembang	Belitang, Kab. Ogan Komerling Ulu Timur	300.000
19)	Palembang	Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin	300.000
5.	Provinsi Riau		
1)	Pekanbaru	Pekanbaru	150.000
2)	Pekanbaru	Bangkinang, Kab. Kampar	100.000
3)	Pekanbaru	Pangkalan Kerinci, Kab. Palalawan	150.000
4)	Pekanbaru	Bengkalis, Kab. Bengkalis	700.000
5)	Pekanbaru	Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir	380.000
6)	Pekanbaru	Rengat, Kab. Indragiri Hulu	315.000
7)	Pekanbaru	Dumai, Kota Dumai	400.000
8)	Pekanbaru	Pasir Pangaraian, Kab. Rokan Hulu	300.000
9)	Pekanbaru	Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi	300.000
10)	Pekanbaru	Siak Sri Indrapura, Kab. Siak	350.000
11)	Pekanbaru	Bagan Siapi-api, Kab. Rokan Hilir	350.000
12)	Pekanbaru	Duri, Kab. Bengkalis	250.000
13)	Pekanbaru	Selat Panjang, Kab. Kepulauan Meranti	600.000
6.	Provinsi Jambi		
1)	Jambi	Jambi	150.000
2)	Jambi	Sengeti, Kab. Muaro Jambi	40.000
3)	Jambi	Muara Bulian, Kab. BatangHari	50.000
4)	Jambi	Muara Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur	80.000
5)	Jambi	Kuala Tungkal, Kab. Tanjung Jabung Barat	150.000
6)	Jambi	Muara Tebo, Kab. Tebo	200.000
7)	Jambi	Muara Bungo, Kab. Bungo	240.000
8)	Jambi	Bangko, Kab. Merangin	220.000
9)	Jambi	Sarolangun, Kab. Sarolangun	170.000
10)	Jambi	Siulak, Kab. Kerinci	325.000
11)	Jambi	Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh	308.000
12)	Jambi	Muara Bungo, Kab. Bungo (Udara)	1.000.000
13)	Jambi	Siulak, Kab. Kerinci (Udara)	1.020.000

No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
14)	Jambi	Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh (Udara)	1.020.000
7.	Provinsi Bengkulu		
1)	Bengkulu	Bengkulu	150.000
2)	Bengkulu	Tais, Kab. Seluma	175.000
3)	Bengkulu	Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan	250.000
4)	Bengkulu	Bintuhan, Kab. Kaur	308.000
5)	Bengkulu	Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara	200.000
6)	Bengkulu	Karang Tinggi, Kab. Bengkulu Tengah	150.000
7)	Bengkulu	Muko Muko, Kab. Muko Muko	338.000
8)	Bengkulu	Kepahiang, Kab. Kepahiang	175.000
9)	Bengkulu	Curup, Kab. Rejang Lebong	200.000
10)	Bengkulu	Muara Aman, Kab. Lebong	300.000
8.	Provinsi Lampung		
1)	Bandar Lampung	Bandar Lampung	150.000
2)	Bandar Lampung	Kalianda, Kab. Lampung Selatan	168.000
3)	Bandar Lampung	Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	132.000
4)	Bandar Lampung	Metro, Kota Metro	168.000
5)	Bandar Lampung	Pringsewu, Kab. Pringsewu	144.000
6)	Bandar Lampung	Kota Agung, Kab. Tanggamus	180.000
7)	Bandar Lampung	Sukadana, Kab. Lampung Timur	192.000
8)	Bandar Lampung	Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah	192.000
9)	Bandar Lampung	Kotabumi, Kab. Lampung Utara	204.000
10)	Bandar Lampung	Menggala, Kab. Tulang Bawang	204.000
11)	Bandar Lampung	Tulang bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat	234.000
12)	Bandar Lampung	Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan	240.000
13)	Bandar Lampung	Liwa, Kab. Lampung Barat	240.000
14)	Bandar Lampung	Wiralaga Mulya, Kab. Mesuji	252.000
15)	Bandar Lampung	Krui, Kab. Pesisir Barat	200.000
16)	Bandar Lampung	Pesawaran, Pringsewu	192.000
17)	Bandar Lampung	Pesawaran, Tanggamus	234.000
18)	Bandar Lampung	Pringsewu, Tanggamus	234.000
19)	Bandar Lampung	Metro, Lampung Tengah	234.000
20)	Bandar Lampung	Metro, Lampung Utara	258.000
21)	Bandar Lampung	Metro, Way Kanan	288.000

No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
22)	Bandar Lampung	Lampung Tengah, Lampung Utara	258.000
23)	Bandar Lampung	Lampung Tengah, Way Kanan	312.000
24)	Bandar Lampung	Lampung Tengah, Lampung Timur	306.000
25)	Bandar Lampung	Lampung Utara, Way Kanan	306.000
26)	Bandar Lampung	Lampung Timur, Tulang Bawang	288.000
27)	Bandar Lampung	Lampung Timur, Tulang Bawang Barat	306.000
28)	Bandar Lampung	Lampung Timur, Mesuji	348.000
29)	Bandar Lampung	Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat	294.000
30)	Bandar Lampung	Tulang Bawang, Mesuji	318.000
31)	Bandar Lampung	Tulang Bawang Barat, Mesuji	318.000
32)	Bandar Lampung	Way Kanan, Lampung Barat	306.000
33)	Bandar Lampung	Terminal Bus/Pelabuhan/Stasiun Kereta	90.000
9.	Provinsi Kepulauan Riau		
1)	Batam	Batam	150.000
2)	Batam	Tanjungpinang, Kota Tanjungpinang	530.000
3)	Batam	Tanjung Balai Karimun, Kab. Karimun	520.000
4)	Batam	Bandar Seri Bentan, Kab. Bintan	630.000
5)	Batam	Tanjung Uban, Kab. Bintan	490.000
6)	Batam	Dabo Singkep, Kab. Lingga	980.000
7)	Batam	Daik Lingga, Kab. Lingga	1.030.000
8)	Batam	Ranai, Kab. Natuna	3.710.000
9)	Batam	Tarempa, Kab. Kepulauan Anambas (via Tanjungpinang)	3.890.000
10)	Batam	Tarempa, Kab. Kepulauan Anambas (via Tanjungpinang, jalur laut)	1.640.000
10.	Provinsi Bangka Belitung		
1)	Pangkalpinang	Pangkalpinang	150.000
2)	Pangkalpinang	Sungailiat, Kab. Bangka	200.000
3)	Pangkalpinang	Petaling Mendo Barat, Kab. Bangka	150.000
4)	Pangkalpinang	Merawang, Kab. Bangka	150.000
5)	Pangkalpinang	Muntok, Kab. Bangka Barat	250.000

No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
6)	Pangkalpinang	Koba, Kab. Bangka Tengah	200.000
7)	Pangkalpinang	Toboali, Kab. Bangka Selatan	250.000
8)	Bandara H.A.S Hanandjoeddin	Tanjungpandan, Kab. Belitung	200.000
9)	Bandara H.A.S Hanandjoeddin	Manggar, Kab. Belitung Timur	300.000
11.	Provinsi DKI Jakarta		
1)	Jakarta	Jakarta	150.000
2)	Jakarta	Bandara Halim Perdanakusuma	150.000
3)	Jakarta	Kepulauan Seribu	550.000
4)	Jakarta	Kabupaten/Kota Bogor	300.000
5)	Jakarta	Kabupaten Sukabumi/Cianjur	375.000
6)	Jakarta	Kota Depok/Bekasi/Tangerang	250.000
7)	Jakarta	Kabupaten/Kota Bandung	500.000
8)	Jakarta	Kabupaten Purwakarta/Karawang	450.000
9)	Jakarta	Kabupaten/Kota Serang	450.000
10)	Jakarta	Cirebon/Kuningan	500.000
11)	Bandara Halim Perdanakusuma	Bandung	500.000
12)	Bandara Halim Perdanakusuma	Bogor	300.000
13)	Bandara Soekarno Hatta	Bandung	650.000
14)	Bandara Soekarno Hatta	Bogor	450.000
12.	Provinsi Banten		
1)	Jakarta	Serang, Kota Serang	450.000
2)	Jakarta	Tangerang, Kota Tangerang	250.000
3)	Jakarta	Ciputat, Kota Tangerang Selatan	270.000
4)	Jakarta	Tigaraksa, Kabupaten Tangerang	320.000
5)	Jakarta	Cilegon, Kota Cilegon	490.000
6)	Jakarta	Pandeglang, Kab. Pandeglang	500.000
7)	Jakarta	Malingping, Kab. Lebak	580.000
8)	Jakarta	Rangkasbitung, Kab. Lebak	530.000
9)	Serang	Cilegon, Kota Cilegon	40.000
10)	Serang	Tigaraksa, Kabupaten Tangerang	60.000
11)	Serang	Pandeglang, Kab. Pandeglang	50.000
12)	Serang	Rangkasbitung, Kab. Lebak	80.000

No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
13)	Serang	Ciputat, Kota Tangerang Selatan	110.000
14)	Serang	Tangerang, Kota Tangerang	130.000
15)	Serang	Malingping, Kab. Lebak	130.000
13.	Provinsi Jawa Barat		
1)	Bandung	Bandung	150.000
2)	Bandung	Banjar, Kota Banjar	265.000
3)	Bandung	Bekasi, Kota Bekasi	240.000
4)	Bandung	Bogor, Kota Bogor	285.000
5)	Bandung	Ciamis, Kab. Ciamis	190.000
6)	Bandung	Cianjur, Kab. Cianjur	130.000
7)	Bandung	Cimahi, Kota Cimahi	35.000
8)	Bandung	Cirebon, Kota Cirebon	240.000
9)	Bandung	Depok, Kota Depok	250.000
10)	Bandung	Tarogong Kidul, Kab. Garut	185.000
11)	Bandung	Indramayu, Kab. Indramayu	250.000
12)	Bandung	Karawang, Kab. Karawang	195.000
13)	Bandung	Kuningan, Kab. Kuningan	250.000
14)	Bandung	Majalengka, Kab. Majalengka	170.000
15)	Bandung	Ngamprah, Kab. Bandung Barat	65.000
16)	Bandung	Pelabuhan Ratu, Kab. Sukabumi	190.000
17)	Bandung	Parigi, Kab. Pangandaran	265.000
18)	Bandung	Purwakarta, Kab. Purwakarta	135.000
19)	Bandung	Soreang, Kab. Bandung	65.000
20)	Bandung	Subang, Kab. Subang	115.000
21)	Bandung	Kab. Sukabumi	165.000
22)	Bandung	Sumedang, Kab. Sumedang	160.000
23)	Bandung	Singaparna, Kab. Tasikmalaya	190.000
24)	Ciawi	Jakarta	300.000
25)	Ciawi	Jakarta, Bandara Soekarno Hatta	450.000
26)	Ciawi	Bandung	300.000
27)	Ciawi	Sukabumi	150.000
28)	Ciawi	Bogor Kota	100.000
29)	Ciawi	Cianjur	150.000
30)	Ciawi	Tangerang	250.000
14.	Provinsi Jawa Tengah		
1)	Semarang	Semarang	150.000
2)	Semarang	Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	220.000
3)	Semarang	Purwokerto, Kab. Banyumas	240.000
4)	Semarang	Batang, Kab. Batang	180.000

No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
5)	Semarang	Blora, Kab. Blora	240.000
6)	Semarang	Boyolali, Kab. Boyolali	180.000
7)	Semarang	Brebes, Kab. Brebes	225.000
8)	Semarang	Cilacap, Kab. Cilacap	280.000
9)	Semarang	Demak, Kab. Demak	160.000
10)	Semarang	Purwodadi, Kab. Grobogan	170.000
11)	Semarang	Jepara, Kab. Jepara	180.000
12)	Semarang	Karanganyar, Kab. Karanganyar	200.000
13)	Semarang	Kebumen, Kab. Kebumen	220.000
14)	Semarang	Kendal, Kab. Kendal	160.000
15)	Semarang	Klaten, Kab. Klaten	200.000
16)	Semarang	Kudus, Kab. Kudus	170.000
17)	Semarang	Kota Mungkid, Kab. Magelang	180.000
18)	Semarang	Pati, Kab. Pati	180.000
19)	Semarang	Kajen, Kab. Pekalongan	190.000
20)	Semarang	Pemalang, Kab. Pemalang	200.000
21)	Semarang	Purbalingga, Kab. Purbalingga	240.000
22)	Semarang	Purworejo, Kab. Purworejo	200.000
23)	Semarang	Rembang, Kab. Rembang	200.000
24)	Semarang	Ungaran, Kab. Semarang	160.000
25)	Semarang	Sragen, Kab. Sragen	200.000
26)	Semarang	Sukoharjo, Kab. Sukoharjo	200.000
27)	Semarang	Slawi, Kab. Tegal	220.000
28)	Semarang	Temanggung, Kab. Temanggung	180.000
29)	Semarang	Wonogiri, Kab. Wonogiri	200.000
30)	Semarang	Wonosobo, Kab. Wonosobo	200.000
31)	Semarang	Pekalongan, Kota Pekalongan	190.000
32)	Semarang	Magelang, Kota Magelang	180.000
33)	Semarang	Salatiga, Kota Salatiga	170.000
34)	Semarang	Surakarta, Kota Surakarta	190.000
35)	Semarang	Tegal, Kota Tegal	220.000
15.	Provinsi DI Yogyakarta		
1)	Bantul	Yogyakarta	150.000
2)	Bantul	Bantul (transport lokal)	150.000
3)	Bantul	Sleman, Kab. Sleman	100.000
4)	Bantul	Wonosari, Kab. Gunung Kidul	120.000
5)	Bantul	Wates, Kab. Kulon Progo	120.000
6)	Bantul	Kota Klaten, Kab. Klaten	120.000
7)	Bantul	Kota Mungkid, Kab. Magelang	120.000
8)	Bantul	Magelang, Kota Magelang	120.000

No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
9)	Bantul	Purworejo, Kab. Purworejo	140.000
10)	Bantul	Kebumen, Kab. Kebumen	200.000
11)	Bantul	Cilacap, Kab. Cilacap	300.000
12)	Bantul	Majenang, Kab. Cilacap	350.000
13)	Bantul	Semarang, Kota Semarang	250.000
14)	Bantul	Surabaya, Kota Surabaya	500.000
15)	Bantul	Bandung, Kota Bandung	600.000
16)	Bantul	Jakarta, Provinsi DKI Jakarta	750.000
16.	Provinsi Jawa Timur		
1)	Sidoarjo	Sidoarjo	150.000
2)	Sidoarjo	Surabaya, Kota Surabaya	150.000
3)	Sidoarjo	Gresik, Kab. Gresik	150.000
4)	Sidoarjo	Lamongan, Kab. Lamongan	150.000
5)	Sidoarjo	Tuban, Kab. Tuban	190.000
6)	Sidoarjo	Bojonegoro, Kab. Bojonegoro	150.000
7)	Sidoarjo	Pasuruan, Kab. Pasuruan	156.000
8)	Sidoarjo	Probolinggo	156.000
9)	Sidoarjo	Lumajang, Kab. Lumajang	222.000
10)	Sidoarjo	Jember, Kab. Jember	222.000
11)	Sidoarjo	Situbondo, Kab. Situbondo	210.000
12)	Sidoarjo	Bondowoso, Kab. Bondowoso	210.000
13)	Sidoarjo	Banyuwangi, Kab. Banyuwangi	270.000
14)	Sidoarjo	Mojokerto	150.000
15)	Sidoarjo	Jombang, Kab. Jombang	170.000
16)	Sidoarjo	Nganjuk, Kab. Nganjuk	190.000
17)	Sidoarjo	Kediri	170.000
18)	Sidoarjo	Tulungagung, Kab. Tulungagung	190.000
19)	Sidoarjo	Trenggalek, Kab. Trenggalek	190.000
20)	Sidoarjo	Madiun	190.000
21)	Sidoarjo	Ponorogo, Kab. Ponorogo	210.000
22)	Sidoarjo	Pacitan, Kab. Pacitan	270.000
23)	Sidoarjo	Magetan, Kab. Magetan	206.000
24)	Sidoarjo	Ngawi, Kab. Ngawi	206.000
25)	Sidoarjo	Bangkalan, Kab. Bangkalan	150.000
26)	Sidoarjo	Sampang, Kab. Sampang	170.000
27)	Sidoarjo	Pamekasan, Kab. Pamekasan	186.000
28)	Sidoarjo	Sumenep, Kab. Sumenep	210.000
29)	Sidoarjo	Malang	156.000
30)	Sidoarjo	Blitar	210.000
17.	Provinsi Kalimantan Barat		
1)	Pontianak	Pontianak	150.000
2)	Pontianak	Mempawah, Kab.	160.000

No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
		Mempawah	
3)	Pontianak	Singkawang, Kota Singkawang	220.000
4)	Pontianak	Sambas, Kab. Sambas	300.000
5)	Pontianak	Bengkayang, Kab. Bengkayang	240.000
6)	Pontianak	Ngabang, Kab. Landak	240.000
7)	Pontianak	Sanggau, Kab. Sanggau	300.000
8)	Pontianak	Sekadau, Kab. Sekadau	343.000
9)	Pontianak	Sintang, Kab. Sintang	392.000
10)	Pontianak	Nanga Pinoh, Kab. Melawi	430.000
11)	Pontianak	Putussibau, Kab. Kapuas Hulu	550.000
12)	Pontianak	Ketapang, Kab. Ketapang	550.000
13)	Pontianak	Sukadana, Kab. Kayong Utara	550.000
14)	Pontianak	Kubu Raya, Kec. Teluk Pakedai, Kubu dan Sekitar	200.000
15)	Ketapang	Sukadana, Kab. Kayong Utara	300.000
16)	Pontianak	Putussibau, Kab. Kapuas Hulu (Udara)	2.641.200
17)	Pontianak	Ketapang, Kab. Ketapang (Laut)	650.000
18)	Pontianak	Ketapang, Kab. Ketapang (Udara)	1.501.600
19)	Pontianak	Sukadana, Kab. Kayong Utara (Laut)	700.000
20)	Pontianak	Sukadana, Kab. Kayong Utara (Udara)	1.501.600
21)	Pontianak	Sintang, Kab. Sintang (Udara)	1.500.000
18.	Provinsi Kalimantan Timur		
1)	Samarinda	Samarinda	150.000
2)	Samarinda	Balikpapan, Kota Balikpapan	550.000
3)	Samarinda	Samboja, Kab. Kutai Kartanegara	800.000
4)	Samarinda	Penajam, Kab. Penajam Paser Utara	650.000
5)	Samarinda	Tana Grogot, Kab. Paser	1.650.000
6)	Samarinda	Bontang, Kota Bontang	600.000
7)	Samarinda	Sangatta, Kab. Kutai Timur	1.350.000
8)	Samarinda	Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara	500.000
9)	Samarinda	Sendawar, Kab. Kutai Barat	1.500.000
10)	Samarinda	Sendawar, Kab. Kutai Barat (Udara)	2.200.000

No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
11)	Samarinda	Tanjung Redeb, Kab. Berau(Udara)	2.125.000
12)	Samarinda	Tanjung Selor, Kab. Bulungan(Udara)	2.250.000
13)	Samarinda	Malinau, Kab. Malinau(Udara)	2.900.000
14)	Samarinda	Nunukan, Kab. Nunukan(Udara)	3.109.800
15)	Samarinda	Tarakan, Kota Tarakan(Udara)	2.382.600
16)	Samarinda	Tideng Pale, Kab. Tana Tidung(Udara)	2.632.600
19.	Provinsi Kalimantan Selatan		
1)	Banjarbaru	Banjarbaru	150.000
2)	Banjarbaru	Banjarmasin, Kota Banjarmasin	60.000
3)	Banjarbaru	Marabahan, Kab. Barito Kuala	100.000
4)	Banjarbaru	Martapura, Kab. Banjar	40.000
5)	Banjarbaru	Pelaihari, Kab. Tanah Laut	100.000
6)	Banjarbaru	Batulicin, Tanah Bumbu	300.000
7)	Banjarbaru	Kota Baru, Kab. Kota Baru	400.000
8)	Banjarbaru	Rantau, Kab. Tapin	75.000
9)	Banjarbaru	Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan	100.000
10)	Banjarbaru	Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah	125.000
11)	Banjarbaru	Amuntai, Kab. Hulu Sungai Utara	150.000
12)	Banjarbaru	Paringin, Kab. Balangan	150.000
13)	Banjarbaru	Tanjung, Kab. Tabalong	175.000
14)	Banjarbaru	Kota Baru, Kab. Kota Baru (Udara)	1.282.000
20.	Provinsi Kalimantan Tengah		
1)	Palangka Raya	Palangka Raya	150.000
2)	Palangka Raya	Pulang Pisau, Kab. Pulang Pisau	200.000
3)	Palangka Raya	Kuala Kapuas, Kab. Kapuas	250.000
4)	Palangka Raya	Tamiyang Layang, Kab. Barito Timur	333.000
5)	Palangka Raya	Buntok, Kab. Barito Selatan	290.000
6)	Palangka Raya	Muara Teweh, Kab. Barito Utara	425.000
7)	Palangka Raya	Puruk Cahu, Kab. Murung Raya	448.000
8)	Palangka Raya	Kuala Kurun, Kab. Gunung	300.000

No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
		Mas	
9)	Palangka Raya	Kasongan, Kab. Katingan	200.000
10)	Palangka Raya	Sampit, Kab. Kotawaringin Timur	300.000
11)	Palangka Raya	Kuala Pembuang, Kab. Seruyan	328.000
12)	Palangka Raya	Pangkalan Bun, Kab. Kotawaringin Barat	425.000
13)	Palangka Raya	Sukamara, Kab. Sukamara	525.000
14)	Palangka Raya	Nanga Bulik, Kab. Lamandau	525.000
15)	Palangka Raya	Banjarmasin, Kota Banjarmasin	300.000
16)	Palangka Raya	Banjarbaru, Kota Banjarbaru	400.000
17)	Palangka Raya	Pangkalan Bun, Kab. Kotawaringin Barat (Udara)	990.000
18)	Palangka Raya	Puruk Cahu, Kab. Murung Raya (Udara)	778.000
19)	Pangkalan Bun	Nanga Bulik, Kab. Lamandau	300.000
20)	Pangkalan Bun	Sukamara, Kab. Sukamara	300.000
21)	Pangkalan Bun (Airport)	Pangkalan Bun, Kab. Kotawaringin Barat (tempat tujuan)	160.000
22)	Puruk Cahu (Airport)	Puruk Cahu, Kab. Murung Raya (tempat tujuan)	160.000
21.	Provinsi Bali		
1)	Denpasar	Denpasar	150.000
2)	Denpasar	Negara, Kab. Jembrana	240.000
3)	Denpasar	Singaraja, Kab. Buleleng	230.000
4)	Denpasar	Karangasem, Kab. Karangasem	225.000
5)	Denpasar	Bangli, Kab. Bangli	150.000
6)	Denpasar	Klungkung, Kab. Klungkung	150.000
7)	Denpasar	Gianyar, Kab. Gianyar	150.000
8)	Denpasar	Tabanan, Kab. Tabanan	150.000
9)	Denpasar	Badung, Kab. Badung	75.000
10)	Denpasar	Kepulauan Nusa Penida	350.000
22.	Provinsi Nusa Tenggara Timur		
1)	Kupang	Kupang	150.000
2)	Kupang	Noelbaki, Kab. Kupang	25.000
3)	Kupang	Naibonat, Kab. Kupang	50.000
4)	Kupang	Camplong, Kab. Kupang	50.000
5)	Kupang	Takari, Kab. Kupang	100.000
6)	Kupang	Sulamu, Kab. Kupang	150.000

No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
7)	Kupang	SoE, Kab. Timor Tengah Selatan	150.000
8)	Kupang	Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara	250.000
9)	Kupang	Atambua, Kab. Belu	325.000
10)	Kupang	Betun, Kab. Malaka	500.000
11)	Waingapu	Waibakul, Kab. Sumba Tengah	200.000
12)	Waibakul	Waikabubak, Kab. Sumba Barat	200.000
13)	Waikabubak	Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya	200.000
14)	Lewoleba	Larantuka, Kab. Flores Timur	200.000
15)	Larantuka	Maumere, Kab. Sikka	200.000
16)	Maumere	Ende, Kab. Ende	300.000
17)	Ende	Bajawa, Kab. Ngada	200.000
18)	Bajawa	Mbay, Kab. Nagekeo	200.000
19)	Bajawa	Borong, Kab. Manggarai Timur	300.000
20)	Mbay	Ruteng, Kab. Manggarai	200.000
21)	Ruteng	Labuanbajo, Kab. Manggarai Barat	300.000
22)	Ruteng	Borong, Kab. Manggarai Timur	200.000
23)	Kupang	Ba'a, Kab. Rote Ndao (Udara)	1.850.000
24)	Kupang	Labuan Bajo, kab. Manggarai Barat (Udara)	2.800.000
25)	Kupang	Ruteng, Kab. Manggarai (Udara)	2.700.000
26)	Kupang	Kalabahi, Kab. Alor (Udara)	1.800.000
27)	Kupang	Ende, Kab. Ende (Udara)	1.700.000
28)	Kupang	Maumere, Kab. Sikka (Udara)	1.400.000
29)	Kupang	Sabu, Kab. Sabu Raijua(Udara)	2.250.000
30)	Kupang	Lewoleba, Kab. Lembata(Udara)	1.700.000
31)	Kupang	Larantuka, Kab. Flores Timur (Udara)	1.800.000
32)	Kupang	Mbay, Kab. Nagekeo (Udara)	1.900.000
33)	Kupang	Bajawa, Kab. Ngada (Udara)	2.200.000
34)	Kupang	Borong, Kab. Manggarai Timur (Udara)	2.800.000
35)	Kupang	Waingapu, Kab. Sumba Timur (Udara)	2.700.000
36)	Kupang	Waikabubak, Kab. Sumba Barat (Udara)	2.800.000
37)	Kupang	Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya (Udara)	2.700.000

No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
38)	Kupang	Waibakul, Kab. Sumba Tengah (Udara)	2.800.000
39)	Kupang	Ba'a, Kab. Rote Ndao (Laut)	720.000
40)	Kupang	Sabu, Kab. Sabu Raijua (Laut)	1.100.000
23.	Provinsi Nusa Tenggara Barat		
1)	Mataram	Mataram	150.000
2)	Mataram	Gerung, Kab. Lombok Barat	150.000
3)	Mataram	Tanjung, Kab. Lombok Utara	150.000
4)	Mataram	Selong, Kab. Lombok Timur	200.000
5)	Mataram	Praya, Kab. Lombok Tengah	150.000
6)	Mataram	Sumbawa Besar, Kab. Sumbawa	280.000
7)	Mataram	Taliwang, Kab. Sumbawa Barat	200.000
8)	Bandara Sumbawa	Sumbawa Besar, Kab. Sumbawa	50.000
9)	Bandara Sumbawa	Taliwang, Kab. Sumbawa Barat	150.000
10)	Sumbawa Besar	Taliwang, Kab. Sumbawa Barat	150.000
11)	Bandara Bima	Bima, Kota Bima	120.000
12)	Bandara Bima	Dompu, Kab. Dompu	200.000
13)	Bandara Bima	Raba, Kab. Bima	150.000
24.	Provinsi Sulawesi Selatan		
1)	Makassar	Makassar	150.000
2)	Makassar	Bantaeng, Kab. Bantaeng	170.000
3)	Makassar	Barru, Kab. Barru	120.000
4)	Makassar	Belopa, Kab. Luwu	350.000
5)	Makassar	Watampone, Kab. Bone	180.000
6)	Makassar	Bulukumba, Kab. Bulukumba	180.000
7)	Makassar	Enrekang, Kab. Enrekang	200.000
8)	Makassar	Jeneponto, Kab. Jeneponto	160.000
9)	Makassar	Makale, Kab. Tana Toraja	350.000
10)	Makassar	Malili, Kab. Luwu Timur	375.000
11)	Makassar	Malino, Kab. Maros	100.000
12)	Makassar	Turikale, Kab. Maros	40.000
13)	Makassar	Masamba, Kab. Luwu Utara	365.000
14)	Makassar	Palopo, Kota Palopo	350.000
15)	Makassar	Pangkajene, Kab. Pangkajene	80.000
16)	Makassar	Pare-pare, Kota Pare-pare	150.000
17)	Makassar	Pinrang, Kab. Pinrang	160.000
18)	Makassar	Rantepao, Kab. Toraja Utara	350.000
19)	Makassar	Benteng, Kab. Kepulauan	540.000

No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
		Selayar	
20)	Makassar	Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	160.000
21)	Makassar	Sinjai, Kab. Sinjai	180.000
22)	Makassar	Watansoppeng, Kab. Soppeng	180.000
23)	Makassar	Sungguminasa, Kab. Gowa	50.000
24)	Makassar	Pattalassang, Kab. Takalar	80.000
25)	Makassar	Sengkang, Kab. Wajo	180.000
25.	Provinsi Sulawesi Tengah		
1)	Palu	Palu	150.000
2)	Palu	Parigi, Kab. Parigi Moutong	200.000
3)	Palu	Poso, Kab. Poso	280.000
4)	Palu	Ampana, Kab. Tojo Una-Una	340.000
5)	Palu	Luwuk, Kab. Banggai	387.000
6)	Palu	Bungku, Kab. Morowali	380.000
7)	Palu	Toli-toli, Kab. Toli-toli	412.000
8)	Palu	Buol, Kab. Buol	472.000
9)	Palu	Sigi Biromaru, Kab. Sigi	140.000
10)	Palu	Donggala, Kab. Donggala	180.000
11)	Poso	Ampana, Kab. Tojo Una-Una	360.000
12)	Poso	Luwuk, Kab. Banggai	560.000
13)	Tolitoli	Buol, Kab. Buol	500.000
14)	Kolonodale	Bungku, Kab. Morowali	240.000
15)	Palu	Kolonodale, Kab. Morowali Utara	350.000
16)	Luwuk	Salakan, Kab. Banggai Kepulauan (Laut)	360.000
17)	Luwuk	Banggai, Kab. Banggai Laut (Laut)	500.000
18)	Palu	Tolitoli, Kab. Tolitoli (Laut)	700.000
26.	Provinsi Sulawesi Utara		
1)	Manado	Manado	150.000
2)	Manado	Bitung, Kota Bitung	80.000
3)	Manado	Air Madidi, Kab. Minahasa Utara	50.000
4)	Manado	Tomohon, Kota Tomohon	40.000
5)	Manado	Tondano, Kab. Minahasa	60.000
6)	Manado	Amurang, Kab. Minahasa Selatan	60.000
7)	Manado	Ratahan, Kab. Minahasa Tenggara	100.000
8)	Manado	Kotamobagu, Kota Kotamobagu	150.000
9)	Manado	Boroko, Kab. Bolaang Mongondow Utara	300.000

No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
10)	Manado	Tutuyan, Kab. Bolaang Mongondow Timur	200.000
11)	Manado	Bolaang Uki, Kab. Bolaang Mongondow Selatan	250.000
12)	Manado	Lolak, Kab. Bolaang Mongondow	200.000
13)	Manado	Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe	400.000
14)	Manado	Melongguane, Kab. Kepulauan Talaud	450.000
15)	Manado	Ondong Siau, Kab. Sitaro	400.000
16)	Manado	Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe (udara)	860.000
17)	Manado	Melongguane, Kab. Kepulauan Talaud (Udara)	1.400.000
27.	Provinsi Sulawesi Tenggara		
1)	Kendari	Kendari	150.000
2)	Kendari	Unaaha, Kab. Konawe	300.000
3)	Kendari	Kolaka, Kab. Kolaka	370.000
4)	Kendari	Raha, Kab. Muna	760.000
5)	Kendari	Andoolo, Kab. Konawe Selatan	305.000
6)	Kendari	Pasarwajo, Kab. Buton	1.200.000
7)	Kendari	Ereke, Kab. Buton Utara (Laut dan Darat)	1.050.000
8)	Kendari	Konawe Kepulauan	600.000
9)	Kendari	Lasusua, Kab. Kolaka Utara	425.000
10)	Kendari	Baubau, Kota Baubau	1.160.000
11)	Kendari	Asera, Kab. Konawe Utara	300.000
12)	Kendari	Tiworo, Kab. Muna Barat	760.000
13)	Kendari	Rumbia, Kab. Bombana	355.000
14)	Kendari	Batauga, Kab. Buton Selatan	1.160.000
15)	Kendari	Labungkari, Kab. Buton Tengah	1.110.000
16)	Kendari	Tirawuta, Kab. Kolaka Timur	300.000
17)	Kendari	Wanci, Kab. Wakatobi(Udara)	2.100.000
28.	Provinsi Sulawesi Barat		
1)	Mamuju	Mamuju	150.000
2)	Mamuju	Majene, Kab. Majene	200.000
3)	Mamuju	Polewali, Kab. Polewali Mandar	240.000
4)	Mamuju	Mamasa, Kab. Mamasa	359.000
5)	Mamuju	Topoyo, Kab. Mamuju Tengah	200.000
6)	Mamuju	Pasangkayu, Kab. Mamuju	270.000

No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
		Utara	
29.	Provinsi Gorontalo		
1)	Gorontalo	Gorontalo	150.000
2)	Gorontalo	Limboto	100.000
3)	Gorontalo	Suwawa, Kab. Bone Bolango	80.000
4)	Gorontalo	Kwandang, Kab. Gorontalo Utara	260.000
5)	Gorontalo	Tilamuta, Kab. Boalemo	280.000
6)	Gorontalo	Marisa, Kab. Pohuwato	380.000
30.	Provinsi Maluku		
1)	Ambon	Ambon	150.000
2)	Ambon	Tual, Kota Tual	4.550.000
3)	Ambon	Langgur, Kab. Maluku Tenggara	4.550.000
4)	Ambon	Saumlaki, Kab. Maluku Tenggara Barat	4.800.000
5)	Ambon	Tiakur, Kab. Maluku Barat Daya	20.140.000
6)	Ambon	Piru, Kab. Seram Bagian Barat	900.000
7)	Ambon	Bula, Kab. Seram bagian Timur	1.800.000
8)	Ambon	Dobo, Kab. Kepulauan Aru	3.650.000
9)	Ambon	Masohi, Kab. Maluku Tengah (Udara)	2.600.000
10)	Ambon	Masohi, Kab. Maluku Tengah (Laut)	1.100.000
11)	Ambon	Namlea, Kab. Buru (Udara)	2.700.000
12)	Ambon	Namlea, Kab. Buru (Laut)	2.100.000
13)	Ambon	Namrole, Kab. Buru Selatan (Udara)	2.600.000
14)	Ambon	Namrole, Kab. Buru Selatan (Laut)	2.500.000
31.	Provinsi Maluku Utara		
1)	Ternate	Ternate	150.000
2)	Ternate	Kota Sofifi	900.000
3)	Ternate	Soasiu, Kab. Tidore Kepulauan	600.000
4)	Ternate	Jailolo, Kab. Halmahera Barat	1.400.000
5)	Ternate	Maba, Kab. Halmahera Timur	2.200.000
6)	Ternate	Weda, Kab. Halmahera Tengah	1.700.000
7)	Ternate	Labuha, Kab. Halmahera Selatan	1.500.000

No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
8)	Ternate	Tobelo, Kab. Halmahera Utara	1.500.000
9)	Halmahera Utara	Daruba, Kab. Pulau Morotai	1.500.000
10)	Ternate	Sanana, Kab. Kepulauan Sula	2.100.000
32.	Provinsi Papua		
1)	Jayapura	Jayapura	150.000
2)	Jayapura	Sentani, Kab. Jayapura	504.000
3)	Jayapura	Sarmi, Kab. Sarmi	2.650.000
4)	Jayapura	Biak, Kab. Biak Numfor	2.968.000
5)	Jayapura	Merauke, Kab. Merauke	1.134.000
6)	Bandara Terdekat, Supiori	Sorendiwari, Kab. Supiori	3.000.000
7)	Bandara Terdekat, Sumohai	Sumohai, Kab. Yahukimo	200.000
8)	Bandara Terdekat, Merauke	Mindiptana, Kab. Boven Digoel	10.000.000
9)	Bandara Terdekat, Timika	Timika, Kab. Mimika	200.000
10)	Bandara Terdekat, Serui	Serui, Kab. Kepulauan Yapen	1.000.000
11)	Bandara Terdekat, Oksibil	Oksibil, Kab. Pegunungan Bintang	400.000
12)	Bandara Terdekat, Nabire	Enarotali, Kab. Paniai	7.000.000
13)	Bandara Terdekat, Nabire	Nabire, Kab. Nabire	200.000
14)	Bandara Terdekat, Wamena	Mulia, Kab. Puncak Jaya	200.000
15)	Bandara Terdekat, Wamena	Wamena, Kab. Jayawijaya	200.000
16)	Bandara Terdekat, Membramo	Kobakma, Kab. Mamberamo Tengah	200.000
17)	Bandara Terdekat, Mappi	Kepi, Kab. Mappi	200.000
18)	Bandara Terdekat, Waropen	Botawa, Kab. Waropen	1.100.000
19)	Bandara Terdekat, Yalimo	Elelim, Kab. Yalimo	200.000
20)	Jayapura	Sugapa, Kab. Intan Jaya (Udara)	5.028.000
21)	Jayapura	Sumohai, Kab. Yahukimo (Udara)	2.968.000
22)	Jayapura	Timika, Kab. Mimika (Udara)	2.968.000
23)	Jayapura	Serui, Kab. Kepulauan Yapen (Udara)	3.768.000
24)	Jayapura	Oksibil, Kab. Pegunungan Bintang (Udara)	3.368.000
25)	Jayapura	Nabire, Kab. Nabire (Udara)	4.168.000

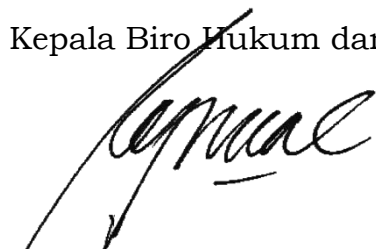
No.	Kota/Kabupaten Asal	Kota/Kabupaten Tujuan	Biaya Transpor PP (Rp)
26)	Jayapura	Mulia, Kab. Puncak Jaya (Udara)	4.768.000
27)	Jayapura	Wamena, Kab. Jayawijaya (Udara)	2.768.000
28)	Jayapura	Burmeso, Kab. Mamberamo Raya (Udara)	6.068.000
29)	Jayapura	Kepi, Kab. Mappi (Udara)	4.968.000
30)	Jayapura	Arso, Kab. Kerom (Darat)	800.000
31)	Jayapura	Elelim, Kab. Yalimo (Udara)	4.868.000
32)	Jayapura	Botawa, Kab. Waropen (Udara)	3.320.000
33.	Provinsi Papua Barat		
1)	Manokwari	Manokwari	150.000
2)	Manokwari	Bintuni, Kab. Teluk Bintuni	900.000
3)	Manokwari	Sorong (Udara)	1.800.000
4)	Manokwari	Kaimana (Udara)	3.750.000
5)	Manokwari	Bintuni, Kab. Teluk Bintuni (Udara)	2.250.000
6)	Manokwari	Fak-Fak (Udara)	4.300.000
7)	Manokwari	Ransiki	1.200.000
8)	Manokwari	Pegunungan Arfak	2.650.000
9)	Sorong	Aimas, Kab. Sorong	500.000
10)	Sorong	Waisai, Kab. Raja Ampat	440.000
11)	Sorong	Sausapor, Kab. Tambrauw	2.000.000
12)	Sorong	Ayamaru, Kab. Maybrat	1.500.000
13)	Sorong	Teminabuan, Kab. Sorong Selatan	1.500.000
14)	Sorong	Fak-Fak	3.000.000
15)	Kaimana	Fak-Fak	2.600.000

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAIFUDIN TAGAMAL